

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini berbagai media massa Indonesia gencar memberitakan desakan Pemerintah RI pada Pemerintah Swedia untuk menindak warganegarannya yang menjadi pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tidak kurang dari anggota DPR-RI, politisi, pejabat pemerintah hingga para pengamat politik sempat melontarkan kecaman terhadap sikap Pemerintah Swedia yang dianggap tidak mengambil tindakan apapun terhadap warganegarannya yang menjadi pimpinan GAM yang bermarkas di Stockholm. Komentar yang terlontar sangat beragam dan tajam, antara lain agar Pemerintah RI melakukan tekanan keras pada Pemerintah Swedia, meninjau hubungan diplomatik RI-Swedia, hingga muncul ide untuk membawa Swedia ke Mahkamah Internasional jika tetap tidak melakukan tindakan apapun pada para pimpinan GAM.

Presiden Megawati bahkan sempat mengutus mantan Menlu RI Ali Alatas berkunjung ke Stockholm pada 24-25 April 2003 dan bertemu Menlu Swedia Anna Lindh dan penasihat Bengt-Save Soderberg, untuk memperkuat desakan tersebut. Apa sebetulnya yang menyebabkan Pemerintah Swedia tidak mengambil tindakan apapun terhadap warganegarannya tersebut ? Bagaimana sebetulnya posisi Swedia di tengah pertikaian antara RI dan GAM ?

Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Swedia di Stockholm yang dihubungi *Antara* di Brussel sempat menyatakan bahwa dirinya sangat terkejut dan prihatin dengan perkembangan pemberitaan pers di Indonesia yang menurut dia sangat tidak adil, tidak tepat dan cenderung memojokkan Pemerintah Swedia.

“Hal pertama yang saya ingin kemukakan pada Anda yakni Swedia sangat menghargai Indonesia, mendukung kesatuan negara Indonesia, dan sama sekali tidak mendukung GAM,” tegas Direktur Departemen Asia pada kementerian luar negeri Swedia, Lars Freden.

“Betul bahwa para pimpinan GAM tersebut telah menjadi warganegara Swedia sejak puluhan tahun lalu, tetapi bukan berarti kami dapat melarang aktivitas mereka. Kami hanya dapat melakukan suatu tindakan jika memang terdapat bukti mereka terlibat suatu tindakan kriminal,” kata Freden.

Dikatakan bahwa undang-undang Swedia memperkenankan setiap orang untuk melakukan aktivitas politiknya secara bebas, kendati itu ditujukan untuk negara lain.

“Kami telah katakan kepada para pejabat Indonesia, tolong berikan kami bukti bahwa para pimpinan GAM Swedia memang terlibat tindakan kriminal. Tapi sampai saat ini tidak satu buktipun yang diberikan Indonesia pada kami,” kata dia.

Menurut Freden, hal paling jauh yang dapat dilakukan Pemerintah Swedia adalah bertemu dengan para pimpinan GAM Swedia dan menganjurkan mereka untuk memecahkan permasalahan Aceh melalui dialog damai dengan Pemerintah RI.

Swedia dan berbicara langsung dengan mereka, termasuk di antaranya dengan tokoh puncak GAM Dr.Hasan Tiro serta orang keduanya, yakni Dr.Zaini Abdullah, yang selalu memimpin delegasi GAM pada setiap pertemuan dengan delegasi RI.

“Kepada mereka sudah saya sampaikan bahwa Pemerintah Swedia mendukung kesatuan negara Republik Indonesia dan bahwa Pemerintah Swedia sama sekali tidak mendukung GAM. Telah saya katakan pula bahwa perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari RI akan sia-sia karena dunia internasional tidak mendukung mereka,” kata Freden.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyatakan siap membeberkan bukti-bukti baru kepada Pemerintah Swedia, mengenai keterlibatan Hasan Tiro cs dalam memimpin pemberontakan GAM. Menurut Menlu Hassan Wirajuda, keterlibatan Hasan Tiro dalam gerakan pemberontakan di Aceh bukan rahasia lagi dan “... Semua orang sudah tahu bahwa mereka punya kontrol di lapangan,” katanya.

Selain itu, kata Menlu, Indonesia juga akan membeberkan bukti keterlibatan GAM dalam teror bom di Medan, Cijantung, dan BEJ. Dikatakan bahwa bukti-bukti tersebut akan diserahkan dalam beberapa waktu mendatang.

Sementara itu, mantan Dubes RI untuk Swedia Tjahjono yang diwawancarai beberapa waktu lalu sempat menjelaskan bahwa Swedia merupakan negara “surga” bagi para pengungsi dan pencari suaka karena kemudahan negeri tersebut menerima imigran, dan sekitar 10 persen dari total penduduk Swedia yang sebesar sembilan juta orang, adalah para imigran. Dikatakan Tjahjono, umumnya warga Swedia asal Aceh

berperilaku baik di negeri tersebut, tidak melakukan pelanggaran hukum atau mengancam ketertiban umum. "Mereka sadar bahwa status mereka adalah pencari suaka di Swedia," kata dia.

Menurut Tjahjono, masyarakat asal Aceh di Swedia jumlahnya sekitar 200 orang dan itu pun terpecah dalam tiga kelompok yang saling bertentangan, yakni kelompok netral, kelompok *The Free Aceh Movement in Europe* (TFAME), serta *Aceh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) yang dipimpin Dr.Hasan Tiro dan wakilnya Dr.Zaini Abdullah. Kelompok ASNLF dianggap Pemerintah RI memiliki pengaruh besar terhadap para militan di Aceh.

Pada perundingan tahap pertama antara Pemerintah RI dan GAM, kedua kelompok terakhir itu, yakni TFAME dan ASNLF diikutkan dalam perundingan. Namun pada perundingan berikutnya, pihak RI hanya menyertakan ASNLF yang dianggap lebih mewakili kelompok GAM di Aceh.

Tidak terhindarkan lagi, tampaknya isu GAM sedikit banyak telah mempengaruhi hubungan diplomatik RI-Swedia yang sebelumnya sudah berjalan cukup baik. Bagaimana sebetulnya persepsi Swedia sendiri terhadap RI dan bagaimana hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara ?

Kasubid Penerangan KBRI Stockholm Thomas Siregar yang dihubungi mengatakan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Swedia umumnya berjalan baik dan Swedia memandang Indonesia sebagai negara yang mempunyai peranan penting di kawasan regional maupun internasional.

Sesuai dengan kebijakan luar negerinya, Swedia bersikap kritis terhadap masalah HAM di Indonesia. Namun, secara umum Swedia dapat memahami masalah yang dihadapi Indonesia. Swedia menilai Indonesia telah mengambil langkah penting ke arah refor

Untuk lebih memahami dinamika hubungan bilateral RI-Swedia, dan kaitannya dengan gerakan separatis di Aceh, penulis berniat membuat sebuah kajian dengan judul “Pengaruh Konflik Pemerintah RI-GAM terhadap Dinamika Hubungan Bilateral RI-Swedia”.

B. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji pokok permasalahan dengan teori yang relevan serta membuktikan hipotesa dengan data dan bukti-bukti yang ada.
- b. Untuk menganalisis aksi gerakan separatis GAM dalam mempengaruhi pola dinamika hubungan bilateral pemerintah Indonesia dan pemerintah Swedia
- c. Mengetahui faktor penghambat dan pendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus GAM.
- d. Pengaplikasian dari beberapa mata kuliah yang di pelajari selama duduk di perguruan tinggi di antaranya:
 1. Politik Luar Negeri Republik Indonesia, mengenai proses pengambilan Keputusan Luar Negeri.
 2. Poltik Internasional; mencakup didalamnya studi mengenai kebijakan luar negeri dan hubungan internasional

C. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan untuk teman-teman mahasiswa ataupun khalayak umum di dalam menganalisis sebuah fenomena tentunya yang berhubungan dengan bidang kajian politik luar negeri.
- b. Manfaat praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan bagi sebuah pemerintahan ataupun politisi atau pihak-pihak berwenang dalam menyelesaikan konflik-konflik internal dalam sebuah negara sehingga nantinya tidak ikut mempengaruhi hubungan bilateral dengan negara lain.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah pokok dalam kajian ini sebagai berikut:

“Bagaimanakah hubungan RI dengan Swedia terkait dengan adanya pimpinan gerakan separatis Aceh yang menjadi warganegara Swedia?”

E. Kerangka Teori

Dalam permasalahan ini sebenarnya terdapat banyak teori maupun konsep yang dapat digunakan dalam menganalisisnya. Namun penyelesaian dalam masalah ini lebih menekankan pada langkah yang seharusnya digunakan dalam pemerintah Indonesia terhadap Swedia tanpa mengabaikan kepentingan nasional Indonesia. Untuk

itu, penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*Decision Making Theory*) oleh William D. Couplin yang dikaitkan dengan Konsep Kepentingan Nasional (*The National Interest*).

a. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*Decision Making Theory*)

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making Process*) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan sebagai pilihan atas berbagai alternatif yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat Keputusan juga diasumsikan biasa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dan secara luas dapat diartikan sebagai perilaku sebuah negara ketika memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Adanya kerjasama ataupun hubungan dengan bangsa lain berarti bahwa kebijakan dalam negeri suatu bangsa berhubungan dengan kepentingan negara lain atau disebut proses pembuatan keputusan terhadap luar negeri. Maka kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia harus diabdikan demi

Menurut William D. Coplin, Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri atau *Foreign Policy*, yaitu¹:

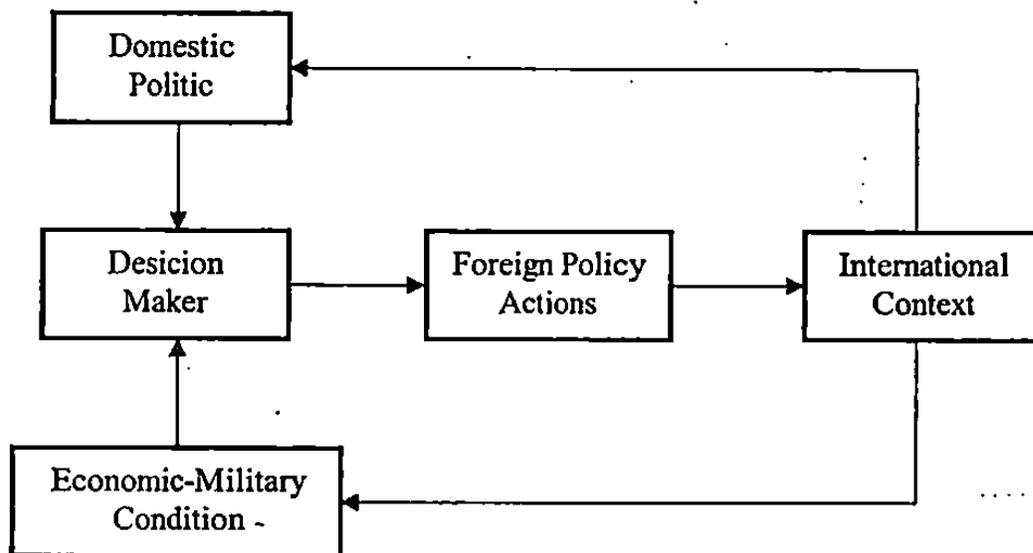
“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu Negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertibdak tanpa mempertimbangkan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: *pertama*, kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. *Kedua*, situasi ekonomi dan militer dinegara tersebut, termasuk faktor goeografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan. *Ketiga*, konteks internasional (situasi dinegara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan permasalahan yang dihadapi)”.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri menurut William D.Coplin sebagai berikut.

¹ Djumadi M.Anwar, *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia : Pengantar Untuk Mahasiswa Jurusan Ilmu*

Proses Pengambilan Keputusan

(Menurut William D.Coplin)



Gambar 01. Proses Pengambilan Keputusan²

Berdasarkan teori diatas, dapat kita ketahui bahwa keputusan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya:

1. *Kondisi Politik Dalam Negeri (Domestic Politics)*

Kondisi Politik dalam negeri Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan serta berbagai peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia seringkali terjadi. Bahkan satu persatu bagian dari wilayah NKRI berkurang dikarenakan adanya keinginan untuk membentuk kedaulatannya sendiri. Gerakan Separatis Aceh Merdeka (GAM) merupakan salah satu gerakan yang mengancam disintegrasi bangsa sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari

Pemerintah Indonesia. Ideologi nasional yang belum mengakar, terlihat dari munculnya gerakan separatisme, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, ideologi nasional yang lebih diimplementasikan ke arah pragmatisme. Permasalahan antara pemerintah RI-Swedia dalam konteks hubungan diplomatik ini berawal dari Hassan Tiro yang berkewarganegaraan Swedia merupakan otak/dalang dibalik konflik yang terjadi antara Pemerintah RI Vs GAM di Nanggroe Aceh Darussalam selama kurun waktu 30 tahun. Kurangnya kerjasama antara Indonesia-Swedia membuat permasalahan ini semakin berlarut-larut yang pada akhirnya pemutusan hubungan diplomatik kedua negara bukan menjadi suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah RI.

2. *Kondisi Ekonomi-Militer (Economic-Military Conditions)*

Perekonomian bangsa Indonesia sedang dalam proses pemulihan ekonomi yang belum tuntas setelah mengalami berbagai krisis multidimensi. Indonesia mulai bangkit dalam keterpurukan ekonomi dengan membina hubungan kerjasama dengan negara lain maupun negara tetangga yang dikhususkan pada bidang ekonomi guna memperbaiki taraf kehidupan bangsa Indonesia. Belum lagi bencana yang terjadi pada beberapa tahun terakhir membuat kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia lagi-lagi mengalami pasang-surut. Ditambah rencana pemerintah RI yang akan memboikot produk Swedia terkait konflik antara RI Vs GAM.

Sedangkan dalam bidang militer, upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan memberantas gerakan separatis yang akan merugikan NKRI diberbagai daerah di Indonesia. Dengan kapabilitas militer, TNI, yang tidak terlepas dari belum tuntasnya reformasi internal, meski belum tumbuhnya postur TNI yang ideal, berkualitas, dan profesional. Serta membantu memulihkan trauma masyarakat sipil, khususnya di Aceh dan pihak asing, internasional, khususnya negara-negara barat yang konsen terhadap HAM, terhadap sikap terjeng TNI di masa lalu, terhadap daerah operasi militer yang dilancarkan TNI meskipun TNI untuk itu telah mendapat payung hukum berdasarkan Keppres RI No. 28 Tahun 2003. Dan ikut menciptakan sistem sosial, politik, dan keamanan nasional yang kondusif dengan adanya kerjasama antara aparat yang berwenang dan masyarakat sekitar untuk memulihkan kembali citra dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia.

3. *Konteks Internasional (International Context)*

Swedia merupakan sebuah negara kecil di benua Eropa yang berbentuk monarki yang merupakan salah satu negara dikawasan Skandinavia. Negara ini sangatlah demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia serta memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Swedia merupakan salah satu dari 21 negara anggota bilateral CGI. Adanya ketergantungan dari pihak Indonesia pada bantuan dan dukungan ekonomi dan keuangan dari pihak barat (CGI, IMF, dan Bank Dunia) mau tidak

mau membuat pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untung dan rugi dalam melakukan keputusan hubungan diplomatik antar keduanya harus benar-benar dipertimbangkan mengingat kepentingan nasional Indonesia. Meskipun bisa dikatakan bahwa Swedia tidak memiliki pengaruh yang besar dalam keanggotaannya. Anggota bilateral lainnya antara lain Australia, Austria, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Italia, Inggris, Jerman, Kuwait, Korea Selatan, Kanada, Norwegia, Portugal, Perancis, Spanyol, Selandia Baru, dan Swiss. Sedangkan anggota multilateral CGI adalah Bank Pembangunan Asia (ADB), Komisi Eropa, International Finance Corporation (IFC), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Islam (IDB), Nordic Development Bank, UNDP, UNICEF, dan Bank Dunia.

Selain itu issue terorisme juga merupakan bagian dari konteks internasional yang terdapat pada bangsa Indonesia dengan adanya beberapa peristiwa pemboman di tanah air beberapa tahun terakhir yang mau tidak mau menimbulkan berbagai asumsi publik yang menganggap Indonesia sebagai teroris.

b. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah :

“The fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalize conception of those element that constitute the state most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well being³”.

(Kepentingan Nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan, yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan Nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi).

Konsep tersebut dapat diartikan bahwa kepentingan pada dasarnya merupakan faktor penting yang menuntut pembuatan kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri, dimana kepentingan meliputi: mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan, kedaulatan, keamanan, militer dan ekonomi. Konsep ini memang sering dipakai dalam mencapai tujuan nasional diluar batas teritorial suatu bangsa. Misalnya berkaitan dengan upaya-upaya yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi persoalan yang menyebabkan terjadinya ketegangan hubungan Indonesia dengan Swedia akibat

³ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston, 1969.

dari sepak terjang Hassan Tiro sebagai pimpinan GAM yang menjadi warga negara Swedia.

Pemerintah melalui lembaga-lembaganya yang pada akhirnya paling bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan politik domestiknya maupun politik luar negerinya yang diarahkan untuk kepentingan nasionalnya.

F. Hipotesa

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dipaparkan diatas serta kerangka teori yang digunakan dapat disimpulkan suatu hipotesa sementara, yaitu sebagai berikut:

“Aksi-aksi Gerakan Separatis Aceh Merdeka (GAM) sepanjang tahun 2001 – 2005 mempengaruhi secara negatif hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia – Swedia”.

Pengaruh negatif tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bidang diplomatik, yaitu dengan penurunan derajat hubungan diplomatik kedua negara sejak pemerintahan Megawati, hingga puncaknya dengan tidak dimasukkannya Swedia ke dalam negara yang mendapat Visa on Arrival dari Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Keputusan yang diambil tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pemberian fasilitas Visa on Arrival kepada suatu negara didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: resiprositas, keamanan dan asas manfaat,

- b. Dari pertimbangan keamanan, Swedia memiliki warga negara, yaitu Hasan di Tiro cs. yang sebelum Helsinki Accord ditandatangani, dianggap sebagai golongan teroris dan membahayakan keamanan negara dan rakyat Indonesia. Berkenan dengan hal tersebut kedatangan warga Swedia ke Indonesia harus ditempuh melalui suatu proses penyaringan khusus, yang dapat dilaksanakan oleh KBRI Stockholm,
 - c. Pemberian fasilitas Visa on Arrival ini senantiasa ditinjau kembali oleh suatu Clearing House yang terdiri dari instansi terkait di Indonesia.
2. Bidang ekonomi dan perdagangan, yaitu dengan sempat menurunnya neraca perdagangan Indonesia Swedia pada kurun 2001 – 2003, sebelum meningkat lagi pada tahun 2004 setelah Pemerintah Swedia menunjukkan niat baiknya untuk membantu penyelesaian masalah Aceh, dan pada 2005, setelah ditandatanganinya nota kesepahaman RI – Swedia terkait masalah GAM.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam masalah ini lebih difokuskan pada hubungan luar negeri Indonesia – Swedia pada tahun 2001 – 2005 akibat konflik yang terjadi antara pemerintah RI Vs GAM, sebab pada waktu tersebut peristiwa ini menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia maupun Internasional.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus dimana studi kasus merupakan salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial untuk penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau situasi sosial.⁴ Studi kasus, secara umum adalah strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan "how" atau "why", bila penelitiannya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu:

- a. Studi kasus eksplanatoris.
- b. Studi kasus eksploratoris.
- c. Studi kasus deskriptif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bertipe studi kasus deskriptif di mana penulis hanya memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan.⁵ Penulis akan menguji teori pengambilan keputusan dan konsep kepentingan nasional dengan dinamika hubungan bilateral pemerintah Indonesia dan pemerintah Swedia terkait dengan aksi gerakan separatis GAM. Di dalam penelitian ini tidak menggunakan data

⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, Hal 201.

⁵ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Hal 24.

yang berupa angka tetapi hanya menggambarkan keadaan hasil atau kondisi obyek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yakni: teknik pengumpulan data yang diperoleh serta dilaksanakan dengan cara mengamati objek yang diteliti dalam hal ini yaitu bagaimana pola dinamika hubungan bilateral pemerintah Indonesia dan pemerintah Swedia terkait aksi gerakan separatis GAM. Observasi yang diikuti peneliti adalah observasi pasif, artinya peneliti mengamati dan melihat berdasarkan kondisi sekitar objek penelitian⁶.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data-data dan menggali serta mencatat dokumen-dokumen dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3. Studi Kepustakaan

Ditujukan untuk memanfaatkan data sekunder dengan memperoleh data, dari memanfaatkan buku-buku, kliping atau makalah, dengan *website-website* di internet, majalah, tv dan media massa yang lain.

⁶ *Op Cit*, Hal 55

c. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa uraian atau penjelasan dimana dalam uraian tersebut tidak diperlukan data yang berwujud angka. Analisis kualitatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan dan hasil dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu aksi gerakan separatis GAM dalam mempengaruhi pola dinamika hubungan bilateral pemerintah RI dan pemerintah Swedia. Variabel ini kemudian menjadi kunci untuk menelaah data-data yang ada berdasarkan penelitian.

Dalam analisis ini data diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan mengambil kesimpulan atas fenomena kebenaran pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang ada, dan kemudian mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan terkait dalam hubungannya dengan penelitian ini,⁷ yaitu aksi gerakan separatis GAM dalam mempengaruhi pola dinamika hubungan bilateral pemerintah RI dan pemerintah Swedia.

Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk mencari gambaran mengenai aksi gerakan separatis GAM dalam mempengaruhi pola dinamika hubungan bilateral Pemerintah RI dan Pemerintah Swedia.

⁷ Aswar Saifudin, *Metoda Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997, Hal 40

Dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasannya yang kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang ada untuk ditafsirkan dan dipahami ke dalam satu kesatuan informasi. Data yang telah terkumpul dalam satu kesatuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan rincian masalahnya. Data yang ada tersebut dihubungkan, kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari sikap permasalahan yang ada.

Penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami pula adalah cara utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang valid. Penyajian ini bisa dengan matriks, grafik atau bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi⁸.

Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Triangulasi data adalah upaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber data yang lain.⁹ Dengan menggunakan metode triangulasi ini dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber pertama masih ada kekurangan.¹⁰ Agar data yang diperoleh ini semakin dipercaya, maka data yang telah diperoleh tidak hanya dicari dari satu sumber saja, tetapi juga berasal dari sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.

⁸ Ashadi Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, LP3Y, Yogyakarta, 1987, Hal 37

⁹ Lexy J. Mollong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, Hal 15

¹⁰ *Ibid*, Hal 116

Cara yang dapat digunakan dalam triangulasi data antara lain dengan menggunakan sumber data. Triangulasi dengan menggunakan sumber data berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif.¹¹ Cara ini ditempuh dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Hasil yang didapat dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, lalu dibandingkan dengan hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian.

Hal-hal penting yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sejarah hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swedia, kebijakan politik luar negeri Indonesia, kebijakan politik luar negeri Swedia, faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya untuk mengekstradisi para petinggi GAM melalui jalur diplomasi, upaya-upaya yang dilakukan para petinggi GAM dalam mencari perlindungan suaka politik kepada pemerintah Swedia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta terperinci mengenai penyusunan skripsi ini, berikut akan penulis uraikan sistematika penulisan. Dimana sistematika tersebut akan penulis bagi menjadi lima bab yang masing-masing berisi mengenai hal-hal sebagai berikut :

¹¹ *Ibid*, Hal 178

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta terperinci mengenai penyusunan skripsi ini, berikut akan penulis uraikan sistematika penulisan. Dimana sistematika tersebut akan penulis bagi menjadi lima bab yang masing-masing berisi mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. BAB I

Dalam bahasan bab pertama ini memuat pendahuluan dengan sub pembahasan terdiri dari : Latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II

Politik Swedia dan Kebijakan terhadap Masalah Internasional

Pada bab ini dijelaskan sejarah Swedia, politik dalam dan luar negerinya, perkembangan ekonomi, serta pandangan politik Swedia terhadap isu-isu internasional, seperti masalah terorisme, Afghanistan hingga masalah Aceh.

c. BAB III

Dinamika Hubungan Luar Negeri RI – Swedia

Memaparkan perkembangan hubungan bilateral kedua negara sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1950. Di sini dipaparkan juga perkembangan neraca perdagangan kedua negara pada tahun 90-an dan setelah masalah GAM memuncak pada kurun 2001 – 2005.

d. BAB IV

Pengaruh Konflik RI-GAM terhadap Hubungan Indonesia-Swedia

Menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi antara pemerintah RI – GAM mampu mempengaruhi hubungan bilateral RI – Swedia serta pendapat-pendapat elite politik mengenai keinginan pemutusan hubungan diplomatik kedua negara. Dan berdampak dengan ditutupnya Kedutaan Besar Swedia di Indonesia dalam beberapa saat. Juga akan dibahas mengenai pertimbangan eksternal atau konteks pandangan internasional yang mempengaruhi pengambilan keputusan Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Swedia terkait konflik GAM.

e. BAB V

Kesimpulan dan Saran – Saran